Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 18 Nomor 3, November 2024: 191-316
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) adalah media ilmiah di bidang kebijakan hukum. Jurnal ini berisi kompilasi hasil penelitian dan kajian, kajian hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, JIKH ditetapkan memiliki Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pembina	:	Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengarah	:	1. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pemimpin Umum/Redaksi (*Chief Editor*)	:	Dr. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Pemimpin Umum/Redaksi (*Chief Editor*)	:	1. Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin) 2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H. 3. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. (BRIN) 4. Edward James Sinaga, S.Si., M.H. 5. Haryono, S.Sos., M.H. 6. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H. (BRIN) 7. Trisapto Agung Nugroho, S.S., M.Si. (BRIN) 8. Imam Lukito, S.T., M.H.
Editor Pelaksana (*Managing Editor*)	:	Fitriyani, S.H., M.Si.
Asisten Editor (*Assisstant Editor*)	:	1. Lindung Budi Mulyawan, S.H. 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. 3. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P. 4. Mira Sukmawati, S.I.P. 5. B. Lora Christyanti, S.I.P. 6. Amirah Balqis, S.H. 7. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasioanal)
Teknologi dan Sistem Informasi	:	1. Haddryson, S.H., M.H. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Andi Rarung, S.H., M.H. 4. Agus Priyatna, S.Kom. 5. Fadillah Said, S.Kom. 6. Harysandy Permana, S.Kom. 7. Adi Octaviantara, A.Md. 8. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Kantor Redaksi:
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Faks. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Peer Reviewer
atas kontribusi mereka dalam meninjau naskah untuk publikasi jurnal ini

1. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
2. Dr. Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., M.A.
Badan Riset dan Inovasi Nasional
3. Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
4.Dr. Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
5. Dr Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
6. Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
7. Darwance, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
8. Jufryanto Puluhalawa, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
9. Muhammad Ali Equatora, A.Ks., M.Si.
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
10. M. Ali Aranoval
Center for Detention Studies

DAFTAR ISI

1. Urgensi Pendaftaran Warisan Budaya Indonesia Secara Internasional dan 2 Usulan Strategi Kebijakan
(The Urgency of Registering Indonesian Cultural Heritage Internationally and 2 Proposed Policy Strategies).....*191-206*
Taufik H. Simatupang, Asmak Ul Hosnah, Djamilus, Ahmad Sanusi
2. Penggunaan ***Law Analyzer*** dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan: Senjakala Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
(The Application of Law Analyzers in Harmonizing Draft Laws: Twilight of Legislative Drafter)..... *207-220*
Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing
3. Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia
(Optimizing Guidelines for Evaluating Legislation to Address Over-Regulation in Indonesia)..... *221-236*
Sujatmiko, Willy Wibowo, Muhaimin, Yuliyanto, Eko Noer Kristiyanto, Ulya Fajri Amriyeny, Dian Nurcahya
4. Tantangan dan Strategi: Layanan Kesehatan Mental pada Lembaga Pemasyarakatan
(The Obstacles and Strategies: Mental Health Services at Correctional Institution) *237-254*
Chintia Octenta, Oki Wahju Budijanto, Adi Ashari
5. Tata Kelola Kebijakan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam Kerangka Penyederhanaan Birokrasi
(Policy Governance of the Employee Work System in the Ministry of Law and Human Rights within the Framework of Bureaucratic Simplification) *255-272*
Nizar Apriansyah, Maharini
6. Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial
(Interpolation of Copyright Protection Based on Moral and Economic Rights Through Licensing on Social Media) *273-290*
Aditya Prastian Supriyadi
7. Manajemen Perbatasan Maritim: Strategi Pengawasan dan Pemeriksaaan Keimigrasian di Perairan Indonesia
(Maritime Border Management: Immigration Clearance and Surveillance Strategy in Indonesia's Waters) *291-316*
Ridwan Arifin, Eva Achjani Zulfa, Margaretha Hanita, Arthur Josias Simon Runturambi

Tajuk Rencana

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan JIKH edisi ketiga pada bulan November 2024. Edisi kali ini menyajikan beberapa tulisan terkait isu kebijakan hukum dan hak asasi manusia.

Edisi kali ini memuat berbagai makalah yang membahas tentang Urgensi Pendaftaran Warisan Budaya Indonesia Secara Internasional dan 2 Usulan Strategi Kebijakan; Penggunaan *Law Analyzer* dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan: Senjakala Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan; Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia; Tantangan dan Strategi: Layanan Kesehatan Mental pada Lembaga Pemasyarakatan; Tata Kelola Kebijakan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam Kerangka Penyederhanaan Birokrasi; Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial; Manajemen Perbatasan Maritim: Strategi Pengawasan dan Pemeriksaaan Keimigrasian di Perairan Indonesia.

Diharapkan tulisan-tulisan ini dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal ini. Kami juga berterima kasih kepada para peninjau atas kontribusi mereka untuk meningkatkan kualitas setiap makalah. Kami juga menyambut ide dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal.

Volume 18 Nomor 3, November 2024

p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2578-7425 (online)

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

(The Urgency of Registering Indonesian Cultural Heritage Internationally and 2 Proposed Policy Strategies)

Taufik H. Simatupang, Asmak Ul Hosnah, Djamilus, Ahmad Sanusi

Indonesia already has many cultural heritages that are registered nationally, but only a few have been registered and received world recognition. This research aims to determine the level of cultural heritage registration that has been carried out and provide suggestions and recommendations for accelerating the registration in question. This study uses a normative legal research method using secondary data through literature studies. Data is obtained from national and international websites, data is analyzed and interpreted using relevant legal theories, conclusions are based on deductive thinking logic. The results of the research show that cultural heritage registrations that have been carried out from 1991 - 2023 are 10 registrations, each year only 0.31 registrations are recorded, meaning less than 1 registration per year. For intangible cultural heritage registrations that have been carried out from 2008 - 2023, there are 13 registrations, each year only 0.87 registrations are recorded, meaning less than 1 registration per year. This registration level is very small when compared with the number of communal intellectual properties recorded until 2024, namely 10,533 communal intellectual properties. To gain world recognition for Indonesia's cultural heritage, a more progressive legal policy strategy is needed, namely sui generis legal strengthening in the field of communal intellectual property and a management policy strategy for more massive involvement, from all regional and central stakeholders, to be equally involved actively and encourage of registration of Indonesian cultural heritage in international institutions.
Keywords: *Registration; Cultural Heritage; Legal Protection; National Identity.*

The Application of Law Analyzers in Harmonizing Draft Laws: Twilight of Legislative Drafter

Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing

The existence of artificial intelligence technology (artificial intelligence) has brought significant changes in various fields, including laws and regulations, in addition to providing convenience but AI also has the potential to be a threat to the human profession. One of them is the presence of law analyzer, as one of the AI-based innovations, capable of analyzing, harmonizing, and providing recommendations for improvement in draft laws and regulations efficiently and accurately which can affect the role of the drafters of laws and regulations. The research method used is sociological research with qualitative analysis, sociological and comparative approaches. This study aims to explore the impact of the use of law analyzer on the role and function of functional positions of legislative drafters. The results of the study show that although law analyzer can improve the speed and quality of the regulatory harmonization process, its existence also raises concerns about the shift in the role of Legislative Drafters. AI technology has the potential to take over tasks previously performed by humans, so Legislative Drafter are required to upgrade skills so that they are not replaced by the presence of AI.
Keywords: *Law, Law, Analyzer; Artificial; Drafter; Harmonization.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Optimizing Guidelines for Evaluating Legislation to Address Over-Regulation in Indonesia

Sujatmiko, Willy Wibowo, Muhaimin, Yuliyanto, Eko Noer Kristiyanto, Ulya Fajri Amriyeny, Dian Nurcahya

Based on data from the Directorate General of Legislation, as of 2024, Indonesia has a total of 52,676 regulations, which include 1,752 Laws, 217 Government Regulations in Lieu of Laws, 4,899 Government Regulations, 2,380 Presidential Regulations, 18,371 Ministerial Regulations, 5,930 Regulations from Heads of Agencies, and 19,077 Regional Regulations. This extensive regulatory framework indicates a trend of hyper-regulation, overlap, ineffectiveness, and ambiguity. The Ministry of National Development Planning/Bappenas encourages ministries, agencies, and local governments to conduct self-assessments through regulatory analysis and evaluation activities. Following this policy, the National Legal Development Agency/BPHN has been designated as the authority to formulate technical policies for monitoring and reviewing Laws, as well as for the analysis and evaluation of legislation as part of national legal development.

This study employs a qualitative approach using Merille S. Grindle's policy implementation model. The findings indicate that the implementation of the guidelines for evaluating legislation (Decision of the Head of the National Legal Development Agency No. PHN-HN.01.03-07 of 2019) has been ineffective. Ministries, agencies, and local governments have not utilized these evaluation guidelines in their regulatory analysis and evaluation activities as outlined in the aforementioned decision. Therefore, a policy recommendation for the National Legal Development Agency is to elevate the legal status of the guidelines for regulatory analysis and evaluation from a Head of Agency Decision to a Regulation of the Minister of Law and Human Rights.

Keywords: *Policy Implementation; Analysis and Evaluation of Legislation; Monitoring and Reviewing of Laws.*

The Obstacles and Strategies: Mental Health Services at Correctional Institution

Chintia Octenta, Oki Wahju Budijanto, Adi Ashari

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the right to adequate physical and mental health services for all people without exception, including correctional inmates. However, in reality, to date, several cases of prisoner deaths suspected to be the result of suicide have been recorded in various correctional institutions in Indonesia. Mental health problems have not become a national priority compared to infectious diseases. This study aims to determine and analyze the challenges and policy strategies in providing mental health services for correctional inmates in prisons. The study used a qualitative method with a descriptive approach, which found that the main obstacle was a lack of resources, training and infrastructure. This study highlights the importance of regular training for correctional officers, improved reintegration programs, and regular evaluations to identify best practices and areas for improvement. Overcoming these challenges requires special attention to cross-sector collaboration and policy development, especially to ensure the protection of mental health rights for inmates, as well as facilitating their rehabilitation and reintegration into society, improving risk assessment through training and comprehensive data collection, as well as improving facilities and development. employee professionalism. To overcome this, the author recommends a policy strategy that includes: (1) Short term, namely developing a Grand Design for Mental Health Services, Standard Operating Procedures for emergency conditions, and Integrated Data Collection, (2) Medium term, namely Strengthening Human Resources, Risk Mapping and Standardization of Screening, Improvement of Facilities and 3) Long term, namely creating a reintegration program, conducting regular national evaluations and creating cross-sector collaboration.

Keywords: *Strategy; Mental Health Services; Correctional.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Policy Governance of the Employee Work System in the Ministry of Law and Human Rights within the Framework of Bureaucratic Simplification

Nizar Apriansyah, Maharini

The bureaucracy in Indonesia still faces serious challenges, such as inefficiency, corruption, collusion, nepotism, and public dissatisfaction with government services. To establish a clean, accountable, and professional government, the Indonesian government has undertaken various bureaucratic simplification efforts in line with the mandate of Presidential Regulation No. 18 of 2020. These measures include transitioning administrative officials to functional roles, restructuring work systems to enhance performance, and promoting a more collaborative and dynamic digital governance model. This study employs a qualitative approach with descriptive analysis to evaluate the implementation of bureaucratic simplification, focusing on the work system policy for employees within the Ministry of Law and Human Rights. Data was collected through interviews with officials from various work units and literature reviews from scientific sources and relevant regulations. The discussion centers on the application of organizational restructuring, position equalization, and work system adjustments within the Ministry. Although these efforts have been successful at the central level, challenges remain at the regional level. The results indicate that while significant progress has been made, further evaluation and adjustments are necessary, particularly regarding employee work system policies at the Regional Office and Technical Implementation Unit levels. Full support from all employees and stakeholders is essential to achieve a more efficient and responsive bureaucracy.

Keywords: *Bureaucratic Reform; Organizational Structure Simplification; Work System Transformation.*

Interpolation of Copyright Protection Based on Moral and Economic Rights Through Licensing on Social Media

Aditya Prastian Supriyadi

The Constitutional Court's Decision Number 84/PUU-XXI/2023 against Law No. 28 of 2014 emphasizes that Social Media platforms based on User Generated Content are prohibited from being apathetic to copyright infringement on their platforms. However, the Constitutional Court's decision still leaves a legal void in efforts to crack down on social media copyright infringement that is relevant to the copyright protection paradigm. This legal vacuum can cause social media only to act repressively and contradict the copyright protection paradigm, which should include moral and economic aspects to fulfill creators' rights. The article's purpose is to analyze the strengthening of copyright licensing policies. The normative law research method is used as a medium for analyzing issues. The writing approach in this article uses conceptual, comparative, and statute approaches. The study results show that there needs to be a legal construction as the basis for platform licensing policies that are useful for creating proportional interpolation of copyright protection on social media. The platform's active participation greatly protects creators' natural rights from the threat of piracy. According to Personality Theory, creators have moral rights that must be protected to obtain channels of economic rights that can be fulfilled. Implementing this policy is expected to create a more responsible digital ecosystem, provide legal certainty for copyright owners, and ensure fair rewards for their creativity.

Keywords: *Social Media; Copyright Protection; Moral and Economy Rights; Licenses.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

(Maritime Border Management: Immigration Clearance and Surveillance Strategy in Indonesia's Waters)

Ridwan Arifin, Eva Achjani Zulfa, Margaretha Hanita, Arthur Josias Simon Runturambi

Maritime immigration control and inspection at Indonesia's sea borders encounter significant difficulties due to poor coordination and collaboration among border authorities. This study explores the implementation of maritime immigration regulations in Indonesia, highlighting their lack of alignment with international standards, particularly in terms of border immigration management and inter-agency cooperation. The research aims to assess the existing legal framework and procedures for immigration control and inspection at Indonesia's maritime borders. The methodology applies both internal and external policy evaluations, conducted through an analysis of national regulations and interviews with relevant agencies. The findings show discrepancies between national regulations and international standards, along with weak border immigration management and inadequate coordination, leading to inefficiencies in maritime border control and inspection. This study contributes to providing a framework for maritime border management, the aspects of control and inspection at Indonesia's maritime borders, and redefining the phases of immigration control and inspection in these areas.

Keywords: *Migration; Cross-Border; Maritime; Immigration; Surveillance.*

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Urgensi Pendaftaran Warisan Budaya Indonesia Secara Internasional dan 2 Usulan Strategi Kebijakan

Taufik H. Simatupang, Asmak Ul Hosnah, Djamilus, Ahmad Sanusi

Indonesia sudah memiliki banyak warisan budaya yang terdaftar secara nasional, namun demikian baru sedikit yang terdaftar dan mendapat pengakuan dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendaftaran warisan budaya yang sudah dilakukan dan memberikan saran serta rekomendasi untuk percepatan pendaftaran dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memakai data sekunder melalui studi literatur. Data diperoleh dari website nasional maupun internasional, data dianalisis dan diinterpretasi dengan menggunakan teori hukum yang relevan, penarikan kesimpulan berdasarkan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk warisan budaya yang sudah dilakukan pendaftarannya sejak tahun 1991 - 2023 adalah sebanyak 10 pendaftaran, setiap tahun tercatat hanya 0,31 pendaftaran, artinya tidak sampai 1 pendaftaran per tahun. Untuk warisan budaya takbenda yang sudah dilakukan pendaftarannya sejak tahun 2008 - 2023 adalah sebanyak 13 pendaftaran, setiap tahun tercatat hanya 0,87 pendaftaran, artinya tidak sampai 1 pendaftaran per tahun. Tingkat pendaftaran ini sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah kekayaan intelektual komunal yang tercatat sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 10533 kekayaan intelektual komunal. Untuk mendapatkan pengakuan dunia atas warisan budaya Indonesia diperlukan strategi kebijakan hukum yang lebih progresif yaitu dengan pengatruan hukum secara sui generis di bidang kekayaan intelektual komunal dan strategi kebijakan manajemen untuk keterlibatan secara lebih masif, dari semua pemangku kepentingan daerah dan pusat, untuk sama-sama terlibat aktif dan mendorong pendaftaran warisan budaya Indonesia di lembaga internasional.
Kata Kunci: Pendaftaran; Warisan Budaya; Perlindungan Hukum; Identitas Bangsa.

Penggunaan *Law Analyzer* dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan : Senjakala Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing

Eksistensi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan, selain memberikan kemudahan tetapi AI juga berpotensi menjadi ancaman bagi profesi manusia. Salah satunya, kehadiran law analyzer, sebagai salah satu inovasi berbasis AI, mampu menganalisis, mengharmonisasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pada rancangan peraturan perundang-undangan secara efisien dan akurat yang dapat berpengaruh terhadap peran perancang peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologis dengan analisis kualitatif dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penggunaan law analyzer terhadap peran dan fungsi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun law analyzer dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas dalam proses harmonisasi peraturan, keberadaannya juga menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya peran perancang peraturan perundang-undangan. Teknologi AI memiliki potensi untuk mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, sehingga para perancang dituntut untuk melakukan upgrade skill agar tidak tergantikan dengan kehadiran AI.
Kata Kunci: Law; Analyzer, Artificia; Perancang; Harmonisasi.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia

Sujatmiko, Willy Wibowo, Muhaimin, Yuliyanto, Eko Noer Kristiyanto, Ulya Fajri Amriyeny, Dian Nurcahya

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4.899 berupa Peraturan Pemerintah, 2.380 berupa Peraturan Presiden, 18.371 berupa Peraturan Menteri, 5.930 berupa Peraturan Kepala Badan dan 19.077 Berupa Peraturan Daerah. Kegemukan regulasi di Indonesia ini menunjukkan kecenderungan hiper-regulasi, tumpang tindih, tidak efektif serta multitafsir. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan self assessment melalui kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut menjadikan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi yang berwenang untuk merumuskan kebijakan teknis pemantauan dan peninjauan Undang-Undang serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pembinaan hukum nasional. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model implementasikan kebijakan Merille S. Grindle. Hasil kajian menunjukkan implementasi pedoman evaluasi peraturan perundang-Undangan (Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019) kurang efektif karena kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan belum menggunakan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut. Untuk itu terdapat rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu meningkatkan status hukum pedoman analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari Keputusan Kepala Badan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan; Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.

Tantangan dan Strategi: Layanan Kesehatan Mental pada Lembaga Pemasyarakatan

Chintia Octenta, Oki Wahju Budijanto, Adi Ashari

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas layanan kesehatan fisik dan mental yang layak untuk semua masyarakat tanpa terkecuali termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun demikian pada kenyataannya sampai dengan saat ini, tercatat beberapa kasus kematian narapidana yang diduga akibat bunuh diri di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan kesehatan mental belum menjadi prioritas nasional jika dibandingkan dengan penyakit menular. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tantangan serta strategi kebijakan dalam pemenuhan layanan kesehatan mental bagi warga binaan pemasyarakatan di lapas. Kajian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana menemukan bahwa kendala utama adalah kurangnya sumber daya, pelatihan, dan infrastruktur. Studi ini menyoroti pentingnya pelatihan rutin bagi petugas pemasyarakatan, peningkatan program reintegrasi, dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi praktik baik dan area yang perlu diperbaiki. Mengatasi tantangan tersebut, diperlukan perhatian khusus pada kolaborasi lintas sektor hingga pengembangan kebijakan terutama untuk memastikan perlindungan hak kesehatan mental bagi warga binaan, serta memfasilitasi, rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat, peningkatan penilaian risiko melalui pelatihan dan pengumpulan data yang komprehensif, serta perbaikan fasilitas dan pengembangan profesionalitas pegawai. Untuk mengatasi ini, penulis merekomendasikan strategi kebijakan yang meliputi: (1) Jangka pendek yaitu menyusun grand design layanan kesehatan mental, standar operasional prosedur untuk kondisi gawat darurat, dan pengumpulan data terintegrasi, (2) Jangka menengah yaitu penguatan sumber daya manusia, pemetaan risiko dan standarisasi skrining, peningkatan fasilitas dan (3) Jangka panjang yaitu membuat program reintegrasi, melakukan evaluasi nasional secara berkala dan menciptakan kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: Strategi; Layanan Kesehatan Mental; Pemasyarakatan

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Tata Kelola Kebijakan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam Kerangka Penyederhanaan Birokrasi

Nizar Apriansyah, Maharini

Birokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti ketidakefisienan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyederhanaan birokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Langkah-langkah tersebut meliputi alih tugas pejabat administrasi ke jabatan fungsional, pengaturan ulang sistem kerja untuk meningkatkan kinerja, serta promosi tata kelola digital yang lebih kolaboratif dan dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengevaluasi implementasi penyederhanaan birokrasi, khususnya terkait kebijakan sistem kerja pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat di berbagai unit kerja dan kajian literatur dari sumber ilmiah dan regulasi terkait. Pembahasan difokuskan pada penerapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja di kementerian, yang meskipun berhasil diterapkan di tingkat pusat, namun masih menemui kendala dalam penerapannya di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun telah ada upaya signifikan, diperlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut, terutama untuk kebijakan sistem kerja pegawai di tingkat kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis. Dukungan penuh dari seluruh pegawai dan pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai birokrasi yang lebih efisien dan responsif.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi; Penyederhanaan Struktur Organisasi; Transformasi Sistem Kerja.

Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial

Aditya Prastian Supriyadi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 terhadap UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan platform media sosial berbasis User Generated Content dilarang apatis terhadap pelanggaran hak cipta di platform mereka. Namun, pasca putusan MK masih meninggalkan kekosongan hukum upaya penindakan pelanggaran hak cipta di media sosial yang relevan dengan paradigma perlindungan hak cipta. Kekosongan hukum ini dapat menyebabkan media sosial hanya bertindak secara represif dan berpotensi bertentangan dengan paradigma perlindungan hak cipta yang seharusnya mencakup aspek moral dan ekonomi untuk pemenuhan hak pencipta. Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis penguatan kebijakan lisensi hak cipta. Metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai media analisis isu. Pendekatan penulisan pada artikel ini menggunakan conseptual approach, comparative approach, and statue approach. Hasil penelitian menunjukkan perlu ada konstruksi hukum sebagai landasan kebijakan lisensi platform yang berguna untuk menciptakan interpolasi perlindungan hak cipta secara proporsional di media sosial. Partisipasi aktif platform sangat bermanfaat dalam meningkatkan perlindungan hak alamiah pencipta dari ancaman pembajakan. Sebagaimana menurut personality theory, pencipta memiliki hak moral yang harus dilindungi agar memperoleh saluran hak ekonomi yang dapat terpenuhi. Implementasi kebijakan ini diharapkan platform dapat berkontribusi menciptakan ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab, memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta, dan memastikan penghargaan yang adil atas hasil kreativitas mereka.
Kata Kunci: Media Sosial; Lisensi; Perlindungan Hak Cipta; Hak Moral dan Ekonomi.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Manajemen Perbatasan Maritim: Strategi Pengawasan dan Pemeriksaaan Keimigrasian di Perairan Indonesia

Ridwan Arifin, Eva Achjani Zulfa, Margaretha Hanita, Arthur Josias Simon Runturambi

Pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian maritim di perbatasan laut Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat kurangnya koordinasi dan kerja sama antar-otoritas perbatasan. Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi keimigrasian maritim di Indonesia yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional, termasuk manajemen keimigrasian di perbatasan maritim dan kolaborasi antar-lembaga. Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum dan prosedur pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian di perbatasan maritim Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah evaluasi kebijakan, baik internal maupun eksternal, melalui analisis peraturan nasional dan wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan standar internasional, lemahnya manajemen keimigrasian di perbatasan maritim serta kurangnya koordinasi yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pengawasan dan pemeriksaan perbatasan maritim. Kesimpulannya, terdapat inkonsistensi regulasi kelautan dan kurangnya koordinasi antar-lembaga maritim dapat menghambat upaya menjaga keamanan perbatasan dan mengelola migrasi internasional secara efektif. Rekomendasi dalam riset ini mencakup kerangka manajemen perbatasan maritim, aspek pengawasan dan pemeriksaan di perbatasan maritim Indonesia, serta rekonsepsi fase pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian di perbatasan maritim Indonesia.

Kata Kunci: Migrasi; Lintas Batas; Maritim; Keimigrasian; Pengawasan.